



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASRUDDIN CANIAGO**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **10920**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 888.922.000

1. Tanah Seluas 530 m2 di TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.687.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di TAPANULI TENGAH, WARISAN Rp. 147.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 690.735.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 335.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ETIOS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 204.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 384.667.573**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.812.689.573**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.812.689.573

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.